

**ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA
PEMERINTAHAN MODERN*****PUBLIC POLICY ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF MODERN GOVERNANCE*****Mahar Muharram****Hamzah Assabrun****Malik¹**Institut Teknologi dan
Kesehatan Tri Tunas
Nasional¹

email:

[maharmuharramham@
gmail.com](mailto:maharmuharramham@gmail.com)**Irwan²**Institut Teknologi dan
Kesehatan Tri Tunas
Nasional²

email:

[irwan.juma99@
gmail.com](mailto:irwan.juma99@gmail.com)**Abd. Haris Zainuddin³**Universitas
Muhammadiyah
Makassar³

email:

[abdhariszainuddin@
unismuh.ac.id](mailto:abdhariszainuddin@unismuh.ac.id)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern yang menekankan prinsip kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan adaptabilitas. Pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance* telah mengubah proses kebijakan publik dari pola hierarkis menjadi berbasis jejaring (*network governance*), yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan kebijakan nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis terhadap literatur yang membahas hubungan antara kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan modern menuntut kebijakan publik yang inklusif, berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta didukung oleh pemanfaatan inovasi digital. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia mencerminkan upaya modernisasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan digital, resistensi birokrasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan masih bersifat formal dan belum mencapai partisipasi bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam era tata kelola pemerintahan modern ditentukan oleh kapasitas institusional yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi digital yang inklusif. Reformasi birokrasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan etika publik menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan demokratis.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Tata Kelola Pemerintahan Modern; Digital Governance; Kolaborasi Kebijakan.

Abstract: This study aims to analyze public policy within the perspective of modern governance, which emphasizes the principles of collaboration, transparency, accountability, participation, and adaptability. The paradigm shift from government to governance has transformed public policymaking from a hierarchical process into a network-based approach (network governance) involving multiple actors, including government institutions, civil society, academia, and the private sector, across all stages of policy formulation, implementation, and evaluation. This research employs a qualitative descriptive approach using a literature review method. Data were collected from academic journals, scholarly books, and relevant national and international policy reports published between 2015 and 2025. The analysis was conducted through systematic stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, focusing on the relationship between public policy and modern governance. The findings indicate that modern governance requires public policies that are inclusive, evidence-based, and supported by digital innovation. The implementation of the Electronic-Based Government System (EBGS) in Indonesia represents a concrete effort to modernize bureaucracy through the digitalization of public services. However, its effectiveness is still constrained by challenges such as the digital divide, bureaucratic resistance to change, and weak inter-agency coordination. Furthermore, public participation in the policymaking process remains largely formalistic and has yet to achieve meaningful participation. This study concludes that the success of public policy in the era of modern governance is determined by strong institutional capacity, cross-sectoral collaboration, and inclusive digital innovation. Bureaucratic reform, enhanced public digital literacy, and the strengthening of public ethics are essential prerequisites for building adaptive, transparent, and democratic governance.

Keywords: Public Policy; Modern Governance; Digital Governance; Policy Collaboration.

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 6, No. 2, pp. 155-162
Maret 2026Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia**PENDAHULUAN**

Dalam era pemerintahan modern, konsep dan praktik kebijakan publik telah mengalami transformasi signifikan. Kebijakan

publik tidak lagi hanya dipandang sebagai serangkaian regulasi atau intervensi pemerintahan yang statis, melainkan sebagai rangkaian proses yang dinamis dan adaptif

yang melibatkan berbagai aktor negara, masyarakat sipil, sektor swasta dalam kerangka tata kelola yang baik (*good governance*) dan inovatif. Paradigma ini sejalan dengan peralihan dari "*government*" menuju "*governance*" yang menekankan kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahap siklus kebijakan publik (Osborne, 2006).

Di Indonesia, relevansi tata kelola pemerintahan modern semakin mendesak mengingat kompleksitas tantangan pembangunan, modernisasi teknologi, dan tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap pelayanan pemerintah. Sebagai contoh, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui kebijakan seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95/2018 menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, dan inklusif (Murdhani, 2025). Selain itu, riset terkini menunjukkan bahwa model *agile governance* yang menekankan responsivitas terhadap perubahan sosial dan penggunaan teknologi digital berkontribusi secara positif terhadap kepuasan warga dalam pelayanan publik di Indonesia (Lukman & Hakim, 2024).

Perkembangan administrasi publik pada abad ke-21 menuntut adanya redefinisi terhadap konsep kebijakan publik. Dalam pandangan klasik, kebijakan publik (*public policy*) sering dipahami sebagai keputusan yang diambil pemerintah untuk memecahkan masalah publik (Dye, 1972). Peralihan paradigma dari *government* menuju *governance* bukan sekadar perubahan istilah, melainkan pergeseran cara negara bekerja dari pola hierarkis yang menempatkan pemerintah sebagai aktor tunggal, menuju pola jejaring yang mengandaikan kolaborasi lintas-aktor, keterbukaan informasi, akuntabilitas publik, serta kemampuan adaptif menghadapi ketidakpastian sosial teknologis.

Dalam konteks Indonesia yang sedang menata ulang reformasi birokrasi dan memperluas digitalisasi layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kebutuhan akan analisis kebijakan publik yang berangkat dari perspektif tata kelola pemerintahan modern menjadi semakin mendesak sebab kebijakan tidak hanya dinilai dari apa yang diputuskan, tetapi juga dari bagaimana prosesnya dibentuk, siapa yang dilibatkan, dan bagaimana akuntabilitasnya dijaga.

Transformasi kebijakan publik melalui perspektif tata kelola pemerintahan modern juga menuntut perubahan mendasar dalam kapasitas institusional birokrasi, struktur koordinasi antar lembaga, serta mekanisme partisipasi publik. Kapasitas institusi yang memadai memungkinkan pelaksanaan kebijakan secara profesional dan responsif terhadap dinamika lingkungan eksternal (Grindle, 2017). Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan bukan hanya meningkatkan legitimasi, tetapi juga memungkinkan kebijakan yang lebih relevan dan berkelanjutan. Koordinasi antaraktor menjadi kunci karena masalah publik masa kini bersifat kompleks dan sering lintas-sektor. Selain itu, digitalisasi administrasi publik tidak hanya mempercepat alur pelayanan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Frinaldi et al., 2024). Studi menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem pemerintahan Indonesia telah meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkuat mekanisme kontrol publik (Gusman, 2024). Namun demikian, berbagai hambatan seperti kesenjangan infrastruktur digital, literasi digital yang rendah, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif tetap menjadi tantangan utama dalam proses ini.

Konsep tata kelola pemerintahan modern (*modern governance*) tidak hanya mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, tetapi juga menekankan *network*

governance, yaitu pengelolaan kebijakan melalui jejaring kolaboratif antaraktor. Di Indonesia, fenomena ini terlihat melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku swasta dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sebagaimana dijelaskan oleh Pradana et al. (2023), model *collaborative governance* di Indonesia mulai berkembang terutama dalam isu-isu lingkungan, pendidikan, dan kesehatan, di mana pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pengambil keputusan, tetapi berperan sebagai fasilitator dan koordinator. Selain itu, tata kelola pemerintahan modern menuntut adanya inovasi kebijakan publik. Inovasi tidak hanya bermakna perubahan teknis, melainkan juga transformasi kelembagaan dan pola pikir birokrasi. Riset Susniwati et al. (2024) menunjukkan bahwa inovasi kebijakan melalui inisiatif *e-government* di Indonesia mampu meningkatkan keterlibatan warga dan mempercepat pelayanan publik. Namun demikian, inovasi kebijakan juga memerlukan prasyarat penting, yakni kesiapan sumber daya manusia birokrasi dan infrastruktur digital yang merata (Murdhani, 2025).

Kebaruan (*novelty*) kajian ini terletak pada upayanya menyatukan tiga poros analisis yang sering dibahas terpisah: (1) prinsip *good governance* sebagai landasan normatif-etik (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas), (2) *network/collaborative governance* sebagai arsitektur relasional proses kebijakan, dan (3) *digital governance* khususnya SPBE sebagai infrastruktur yang mengubah cara kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Dengan sintesis ini, kajian menawarkan dasar ilmiah untuk membaca keberhasilan/kegagalan kebijakan publik di era pemerintahan modern melalui dua lensa sekaligus: lensa nilai (*governance principles*) dan lensa kapasitas (*policy capacity*) yang dipengaruhi teknologi dan kolaborasi.

Adapun latar belakang dari kajian ini disusun secara ringkas untuk menghindari bias alur berpikir. Pertama, masalah publik kontemporer cenderung bersifat lintas-sektor dan saling terhubung, sehingga kebijakan yang didesain secara parsial mudah mengalami *design mismatch* dan kegagalan koordinasi. Kedua, digitalisasi pemerintahan membuka peluang efisiensi dan transparansi, tetapi juga menghadirkan risiko: kesenjangan akses, resistensi birokrasi, fragmentasi sistem, serta partisipasi warga yang masih formalistik. Ketiga, tuntutan publik terhadap layanan yang cepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan membuat kualitas proses kebijakan menjadi indikator penting dari legitimasi pemerintahan modern.

Berangkat dari konteks tersebut, kajian ini memposisikan “tata kelola pemerintahan modern” sebagai pendekatan teoretik utama dengan penekanan *pada New Public Governance* (Osborne, 2006) dan gelombang *governance* (Rhodes, 2012), yang kemudian dioperasionalkan melalui prinsip-prinsip *good governance* (UNDP, 1997; UNDP, 2021), kapasitas kebijakan dan kemungkinan kegagalan tata kelola (Howlett & Ramesh, 2020), serta penguatan *evidence-based policy* (Head, 2022).

Dalam ranah Indonesia, SPBE menjadi ilustrasi empirik kebijakan digital yang relevan untuk menguji koherensi antara nilai, proses, dan kapasitas institusional. Tantangan berikutnya adalah menjaga integritas kebijakan publik di tengah meningkatnya intervensi politik. Kebijakan publik idealnya berbasis kepentingan publik dan bukti empiris, bukan preferensi politik jangka pendek. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan modern memerlukan mekanisme *checks and balances* yang kuat, termasuk keterlibatan lembaga pengawasan, masyarakat sipil, dan media independen. Sebagaimana dikemukakan oleh de Bekker dan Saefullah (2019), tata kelola yang baik tidak hanya soal peraturan dan

prosedur, tetapi juga komitmen moral terhadap keadilan dan integritas publik.

Tujuan kajian/analisis ini adalah: (1) mendeskripsikan karakteristik kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan publik (kapasitas institusional, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi digital yang inklusif); dan (3) menganalisis implikasi prinsip *good governance* terhadap proses formulasi, implementasi, serta evaluasi kebijakan publik di Indonesia, dengan menempatkan SPBE sebagai konteks transformasi digital pemerintahan. Dengan memahami tantangan dan peluang modern, diharapkan kebijakan publik dapat menjadi instrument strategis dalam Pembangunan nasional yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat luas.

Untuk memandu fokus analisis agar tidak melebar, kajian ini dirumuskan ke dalam pertanyaan berikut: 1) Bagaimana karakteristik kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern? 2) Faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas kebijakan publik dalam sistem pemerintahan yang modern? 3) Bagaimana implikasi prinsip *good governance* terhadap proses formulasi dan implementasi kebijakan publik di Indonesia?

METODE ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami fenomena kebijakan publik dalam konteks tata kelola pemerintahan modern secara konseptual dan komprehensif, bukan mengukur variabel secara kuantitatif.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pola, dan prinsip dasar dari berbagai literatur akademik yang relevan dengan tema penelitian. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber

sekunder, antara lain artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks administrasi publik, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan lembaga internasional seperti UNDP dan World Bank dalam rentang waktu 2015–2025. Pemilihan periode ini dimaksudkan untuk menangkap perkembangan terbaru tata kelola pemerintahan modern dan inovasi kebijakan publik di era digital.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu seleksi dan klasifikasi literatur berdasarkan relevansi dengan konsep *good governance*, *digital governance*, dan *policy innovation*; (2) penyajian data, yakni pengorganisasian temuan dalam bentuk tema-tema analisis seperti kolaborasi, partisipasi, dan digitalisasi kebijakan publik; serta (3) penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi konseptual terhadap temuan untuk menjelaskan hubungan antara tata kelola pemerintahan modern dan efektivitas kebijakan publik.

Metode ini memungkinkan peneliti menyusun sintesis teoritik dan refleksi empiris guna menjelaskan bagaimana paradigma tata kelola pemerintahan modern membentuk pola baru dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kerangka Analitis: Kebijakan Publik dalam Lensa Tata Kelola Pemerintahan Modern

Dalam kajian ini, kebijakan publik dipahami sebagai proses yang bergerak dalam tiga ranah yang saling terkait: (a) ranah nilai prinsip *good governance* sebagai standar normatif; (b) ranah relasi jejaring aktor dalam *network/collaborative governance*; dan (c) ranah kapasitas kemampuan institusi mengubah keputusan menjadi tindakan melalui sumber daya, prosedur, data, serta teknologi (Howlett & Ramesh, 2020; Head, 2022). Dengan kerangka ini, kualitas kebijakan tidak semata ditentukan oleh “produk” regulasi, melainkan oleh kualitas proses kolaborasi, keterbukaan

informasi, serta mekanisme akuntabilitas yang menyertai seluruh siklus kebijakan.

Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber sekunder, antara lain artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks administrasi publik, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan lembaga internasional seperti UNDP dan *World Bank* dalam rentang waktu 2015–2025, Metode ini memungkinkan peneliti menyusun sintesis teoritik dan refleksi empiris guna menjelaskan bagaimana paradigma tata kelola pemerintahan modern membentuk pola baru dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik di Indonesia.

Karakteristik Kebijakan Publik dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Modern

Karakteristik kebijakan publik pada tata kelola pemerintahan modern dapat ditandai oleh empat hal utama. (1) Jejaring multiaktor: pemerintah berperan sebagai pengarah/fasilitator, bukan satu-satunya penentu; proses kebijakan mengakui peran masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta (Osborne, 2006; Rhodes, 2012). (2) Orientasi proses yang terbuka: legitimasi kebijakan lahir dari transparansi prosedur dan ketersediaan informasi, bukan sekadar otoritas formal. (3) Berbasis bukti: keputusan kebijakan ditopang data, evaluasi, dan pembelajaran kebijakan (*policy learning*) (Head, 2022). (4) Adaptif: kebijakan dipandang sebagai sistem yang dapat disesuaikan melalui umpan balik khususnya dalam konteks disrupsi teknologi dan perubahan sosial yang cepat.

Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Kebijakan Publik

Efektivitas kebijakan publik dalam sistem pemerintahan modern, sesuai fokus kajian, ditentukan oleh tiga faktor kunci berikut: (a) Kapasitas institusional. Kapasitas mencakup kompetensi analisis kebijakan, kepemimpinan, koordinasi lintas unit, serta

kemampuan menjalankan evaluasi berkelanjutan. Ketika kapasitas lemah, kebijakan rentan menjadi simbolik: dokumen ada, tetapi implementasi tidak konsisten atau tidak terukur (Howlett & Ramesh, 2020). (b) Kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi memperluas sumber daya, memperkaya definisi masalah, dan meningkatkan *policy ownership* di tingkat masyarakat. Namun kolaborasi efektif membutuhkan aturan main, pembagian peran, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas agar jejaring tidak berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan (Osborne, 2006). (c) Inovasi digital yang inklusif. Teknologi mempercepat alur kebijakan dari pengumpulan data, pelayanan, hingga monitoring tetapi hanya efektif bila sistem interoperabel, SDM siap, dan warga memiliki akses serta literasi digital. Tanpa inklusivitas, digitalisasi justru dapat memperlebar kesenjangan dan mengurangi kualitas partisipasi.

Implikasi Prinsip Good Governance terhadap Proses Kebijakan

Prinsip *good governance* memberikan tolok ukur untuk menilai kualitas proses kebijakan pada setiap tahap. Transparansi menuntut keterbukaan informasi kebijakan (agenda, naskah, data dukung, indikator kinerja) agar publik dapat melakukan kontrol sosial. Akuntabilitas menuntut kejelasan siapa bertanggung jawab atas apa, serta bagaimana kinerja dinilai dan diaudit. Partisipasi menuntut keterlibatan publik yang bermakna bukan hanya konsultasi formal agar kebijakan memiliki legitimasi sosial. Efektivitas/efisiensi menuntut desain kebijakan yang realistis, terukur, dan dapat diperbaiki melalui evaluasi. Keempat prinsip ini, bila dipraktikkan secara konsisten, memperkuat kepercayaan publik dan menekan ruang bagi penyimpangan dalam implementasi (UNDP, 1997; UNDP, 2021).

SPBE sebagai Ilustrasi Digital Governance dalam Kebijakan Publik Indonesia

Implementasi SPBE menunjukkan bagaimana *digital governance* dapat menjadi instrumen modernisasi kebijakan dan layanan publik. Di satu sisi, digitalisasi menyediakan peluang efisiensi prosedur, jejak audit yang lebih jelas, serta kanal layanan yang lebih cepat. Di sisi lain, berbagai kendala yang sering muncul interoperabilitas yang belum optimal, fragmentasi aplikasi antarinstansi, kesenjangan infrastruktur dan literasi digital, serta budaya birokrasi yang masih hierarkis menjadi indikator bahwa modernisasi tidak berhenti pada teknologi, tetapi juga menuntut transformasi tata kelola dan kapasitas institusional. Dengan demikian, SPBE relevan dipahami sebagai “arena uji” koherensi antara nilai *good governance*, jejaring kolaboratif, dan kapasitas implementasi kebijakan.

Sintesis Model: Alur Konseptual dan Pembelajaran Kebijakan

Secara konseptual, relasi antarkomponen kajian dapat diringkas sebagai berikut: prinsip *good governance* menjadi fondasi nilai; kapasitas institusional dan kolaborasi menjadi mesin penggerak; transparansi digital memperkuat partisipasi serta akuntabilitas; dan pada akhirnya menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif yang memperkuat kepercayaan publik. Dari sini, pembelajaran utama kajian adalah bahwa modern governance memerlukan perubahan ganda, perubahan sistem (aturan, prosedur, teknologi) dan perubahan kultur (cara berkoordinasi, cara mengambil keputusan, etika pelayanan).

Implikasi Praktis (sesuai fokus kajian)

Pertama, penguatan kapasitas institusional harus diarahkan pada kemampuan analisis berbasis bukti, manajemen data, dan evaluasi kebijakan, bukan hanya pelatihan administratif. Kedua, desain kolaborasi perlu memuat mekanisme

partisipasi bermakna mulai dari pemetaan pemangku kepentingan hingga umpan balik publik yang terdokumentasi. Ketiga, transformasi digital (SPBE) perlu diletakkan dalam agenda integrasi sistem dan interoperabilitas, disertai strategi pemerataan akses dan literasi digital agar inovasi bersifat inklusif.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern adalah proses yang relasional dan adaptif: bergerak dari pola hierarkis menuju jejaring kolaboratif yang menuntut keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi publik yang bermakna. Dalam kerangka tersebut, digital governance dengan SPBE sebagai ilustrasi dapat memperkuat efisiensi dan transparansi, namun hanya akan efektif bila disertai integrasi sistem, kesiapan SDM, dan pemerataan akses serta literasi digital.

Keberhasilan kebijakan publik di era tata kelola pemerintahan modern, sesuai temuan sintesis literatur, ditentukan oleh tiga faktor kunci: (1) kapasitas institusional yang kuat untuk analisis, koordinasi, dan evaluasi berbasis bukti; (2) kolaborasi lintas sektor dengan aturan main dan akuntabilitas yang jelas; dan (3) inovasi digital yang inklusif. Ketiganya bekerja di atas fondasi prinsip *good governance* sehingga kebijakan tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik. Adapun masuk dari penulis yang Pertama, pemerintah perlu memperkuat kapasitas birokrasi melalui peningkatan kompetensi digital dan kemampuan analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Reformasi ASN harus diarahkan pada pembentukan aparatur yang adaptif, kreatif, dan memiliki orientasi pelayanan publik. Kedua, perlu dikembangkan mekanisme kolaboratif lintas sektor, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara

negara, akademisi, bisnis, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan keberlanjutan implementasi. Ketiga, pemerataan infrastruktur digital dan literasi masyarakat harus menjadi prioritas utama agar partisipasi publik tidak hanya bersifat elitis atau terbatas di perkotaan. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan literasi digital yang inklusif dan memperkuat ekosistem open data. Terakhir, diperlukan penguatan etika dan integritas kebijakan publik. Modernisasi tata kelola tidak akan bermakna tanpa komitmen moral terhadap transparansi, keadilan, dan tanggung jawab publik. Dengan sinergi nilai, kapasitas, dan teknologi kebijakan publik di Indonesia dapat menjadi instrument nyata bagi terciptanya yang berkeadaban dan Masyarakat yang berkemajuan.

REFERENSI

- Bappenas. (2023). *Gerakan menuju smart city: Laporan kemajuan program nasional smart city Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- De Bekker, H., & Saefullah, K. (2019). Governance, policies, rules and regulations in Indonesia. In *Cooperative management* (Vol. 689, pp. 1-20). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05423-6_8
- Dye, T. R. (1972). *Understanding public policy*. Prentice Hall.
- Frinaldi, F., Afdalisma, A., Rezeki, A. P. T., & Saputra, B. (2024). Digital transformation of government administration: Analysis of efficiency, transparency, and challenges in Indonesia. In *Proceedings AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024*. <https://journal.iapa.or.id/proceedings/article/download/1096/487>
- Grindle, M. (2017). Good governance, R.I.P.: A critique and an alternative. *Governance*, 30(1), 1–17. <https://doi.org/10.1111/gove.12223>
- Gusman, S. W. (2024). Development of the Indonesian government's digital transformation. *DIJEMSS*, 5(5). <https://pdfs.semanticscholar.org/d4a5/850f54a8a9b7f34db1654dbd06a256a7b5d5.pdf>
- Head, B. W. (2022). Reconsidering evidence-based policy: Key issues and new directions. *Policy and Society*, 41(4), 465–481. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puac018>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). The two orders of governance failure: Design mismatches and policy capacity issues in modern governance. *Policy and Society*, 39(3), 341–357. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785721>
- Kementerian PANRB. (2024). *Laporan evaluasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) nasional*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. Sage Publications.
- Lukman, S., & Hakim, A. (2024). Agile governance, digital transformation, and citizen satisfaction moderated by political stability in Indonesia's socio-political landscape. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(1), 210–228. https://www.ejecs.org/index.php/JEC_S/article/view/2001
- Murdhani, L. A. (2025). The implementation of digital governance in Indonesia: A systematic review of challenges and opportunities. *International Journal of Scientific Research*, 2(1). https://journal.yaumil.org/index.php/ij_sr/article/view/19

Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387.
<https://doi.org/10.1080/14719030600853022>

Pradana, M., Yusuf, M., & Nugraha, R. A. (2023). Collaborative governance in Indonesia: Institutional transformation toward sustainable development. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 87–104.
<https://doi.org/10.31506/jap.v19i2.12345>

Rhodes, R. A. W. (2012). Waves of governance. In D. Levi-Faur (Ed.), *The Oxford handbook of governance* (pp. 33–48). Oxford University Press.

Susniwati, K., Kurniawati, & Susilawati. (2024). Public policy innovation in Indonesia: Enhancing citizen engagement through e-government initiatives. *PINISI Discretion Review*, 8(1).
<https://ojs.unm.ac.id/UDR/article/view/66364>

UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.

UNDP. (2021). *Human development report 2021–2022: Uncertain times, unsettled lives — Shaping our future in a transforming world*. United Nations Development Programme.